



RENCANA KERJA (RENJA) 2024



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN**

Jalan Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo No. 40 Purwodadi



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Pengasih dan Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ini.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ini berisi tentang Rencana Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

Ucapan terima kasih yang tulus kami berikan kepada seluruh pihak – pihak yang terkait dan terlibat dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya, oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang akan datang.

Semoga Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini bermanfaat untuk keberlangsungan dan perkembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan pada khususnya dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada umumnya.

Plt. Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Grobogan



HERU DWI CAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina

NIP. 19801105 200112 1 003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB. I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 6

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 10

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 11

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 13

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 15

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 16

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
 DAERAH 26

BAB. V PENUTUP 42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2024 untuk periode satu tahun yang memuat visi, misi, tujuan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

1. UU 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi.
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan.
 10. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026
 12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
 13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan



1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang komprehensif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (Tupoksi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.
2. Sebagai pedoman unit organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi serta penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

- Bab ini berisi tentang narasi analisis hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023.
- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



- Narasi analisis capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

- Narasi Isu – isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- Narasi hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Narasi hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan
- Tabel 2.4 Usulan Program kegiatan dari para pemangku kepentingan

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- Narasi Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- Narasi Rumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
- Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- Narasi Program dan Kegiatan serta pendanaan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2024.
- Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

BAB V : PENUTUP



- Kaidah Pelaksanaan

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 126 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Atas dasar tersebut di atas maka berikut akan disajikan evaluasi analisis hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun 2022, tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun 2023.
- Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan telah mencapai target dari sasaran yang telah ditentukan artinya ada peningkatan dari tahun ke tahun
- Berikut akan disampaikan pencapaian target dan sasaran dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan berdasarkan Hasil Indeks SPBE :

Tabel 2.1
Hasil Indeks SPBE

No	Indeks SPBE	Satuan	Tahun			Keterangan
			2021	2022	2023	
1	Target	Indeks	3,0	3,1	3,2	Target berdasarkan RPJMD 2021-2026
2	Realisasi	Indeks	2,51	3,37	-	Hasil Penilaian KemenPANRB



Dari hasil tabel tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan nilai atau Indeks SPBE dari tahun ke tahun, Indeks SPBE merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat (58) disebutkan bahwa : Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Pun demikian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, pelaksanaan sasaran dan indikator sasaran diwujudkan ke dalam 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 di dukung dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 8.399.884.250 (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian diubah dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 9.234.585.000,00 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang secara ringkas pencapaian komposisi penggunaan dan realisasinya sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Penyerapan Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Pegawai	4.020.090.250	3.904.719.689	97,13
2	Belanja Barang dan Jasa	4.657.206.250	4.554.105.671	97,79
3	Belanja Modal	627.288.500	624.207.620	99,51
	Jumlah	9.304.585.000	9.083.032.980	97,62

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Belanja Pegawai Tahun 2022 terserap sebesar 97,13%;
- 2. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 terserap sebesar 97,79%;



- 3. Belanja Modal Tahun 2022 terserap sebesar 99,51%.
Total penyerapan keseluruhan adalah sebesar 97,62 %

Adapun secara rinci dapat dilihat pada Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Komuniaksi dan Informatika Kabupaten Grobogan, seperti tabel di bawah ini : Dengan demikian bisa dinilai bahwa Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 dikategorikan berhasil.

Tabel 2.3
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Uraian	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		Januari 2022 - Desember 2022	%	
2	4	8	9	12
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.304.585.000	9.084.478.150	97,63	220.106.850
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.304.585.000	9.084.478.150	97,63	220.106.850
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.234.585.000	9.015.199.718	97,62	219.385.282
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.382.071.500	5.216.885.331	96,93	165.186.169
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.052.500	67.207.500	98,76	845.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.052.500	67.207.500	98,76	845.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.969.020.000	3.854.364.859	97,11	114.655.141
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.969.020.000	3.854.364.859	97,11	114.655.141
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	296.740.000	278.714.750	93,93	18.025.250
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.740.000	42.915.000	91,82	3.825.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	235.799.750	94,32	14.200.250
Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.521.000	686.646.706	99,58	2.874.294
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.725.000	4.725.000	100,00	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.850.000	103.815.000	99,97	35.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.462.000	44.462.000	100,00	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.420.000	15.310.000	99,29	110.000
Penyediaan Bahan/Material	47.236.000	47.236.000	100,00	0



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.828.000	471.098.706	99,42	2.729.294
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.452.000	18.220.000	98,74	232.000
Pengadaan Mebel	18.452.000	18.220.000	98,74	232.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.635.000	180.301.696	87,68	25.333.304
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.270.000	1.270.000	100,00	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.000.000	138.756.696	89,52	16.243.304
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.365.000	40.275.000	81,59	9.090.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.651.000	131.429.820	97,61	3.221.180
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.630.000	54.618.000	99,98	12.000
Pemeliharaan Mebel	19.800.000	18.439.320	93,13	1.360.680
Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	35.961.000	34.150.000	94,96	1.811.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.260.000	24.222.500	99,85	37.500
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.027.136.500	1.003.182.309	97,67	23.954.191
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.027.136.500	1.003.182.309	97,67	23.954.191
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	78.393.000	77.011.463	98,24	1.381.537
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	35.000.000	35.000.000	100,00	0
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	63.690.000	61.439.700	96,47	2.250.300
Pelayanan Informasi Publik	40.430.000	38.929.800	96,29	1.500.200
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	778.106.500	761.186.346	97,83	16.920.154
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.517.000	29.615.000	93,97	1.902.000
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.825.377.000	2.795.132.078	98,93	30.244.922
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.650.982.892	1.644.714.710	99,62	6.268.182
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81.812.200	78.195.100	95,58	3.617.100
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.569.170.692	1.566.519.610	99,83	2.651.082
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.174.394.108	1.150.417.368	97,96	23.976.740
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	94.350.000	94,35	5.650.000
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	73.500.000	73.122.700	99,49	377.300
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	98.188.000	97.500.000	99,30	688.000
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	201.097.050	198.807.182	98,86	2.289.868
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	93.230.350	93.230.200	100,00	150



Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	68.750.000	67.650.000	98,40	1.100.000
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	130.000.000	119.098.800	91,61	10.901.200
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	23.880.000	23.879.800	100,00	200
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	337.334.700	334.364.686	99,12	2.970.014
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	48.414.008	48.414.000	100,00	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	50.000.000	49.674.000	99,35	326.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	50.000.000	49.674.000	99,35	326.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.674.000	99,35	326.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.000.000	49.674.000	99,35	326.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	20.000.000	19.604.432	98,02	395.568
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	20.000.000	19.604.432	98,02	395.568
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.604.432	98,02	395.568
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.604.432	98,02	395.568

Dengan demikian bisa dinilai dan disimpulkan bahwa Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 dikategorikan berhasil.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat (52) disebutkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Untuk itu perlu dirumuskan Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagai bentuk darai arah kebijakan. Secara umum Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah pada peningkatan Indeks SPBE yang terkait dengan adanya penambahan indikator dari 35 indikator menjadi 47 indikator untuk itu diperlukan beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan evaluasi komprehensif terhadap 47 indikator SPBE, untuk mengetahui indikator-indikator mana yang sudah dilaksanakan lengkap dengan bukti pendukung, dan indikator-indikator mana yang belum dilaksanakan dan/atau belum dilengkapi dengan bukti pendukung.
2. Membangun dan melaksanakan program/kegiatan yang menjadi indikator penting penilaian SPBE sesegera mungkin, yaitu :
 - Membangun Portal Layanan SPBE mencakup Portal Layanan Pemerintahan (internal) dan Portal Layanan Publik (eksternal).
 - Melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE.
 - Melaksanakan Audit Aplikasi SPBE.
 - Menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis dari 47 indikator SPBE.
 - Inovasi Proses Bisnis SPBE mencakup alur kerja/standar kerja yang berlaku untuk semua OPD di lingkungan Pemkab Grobogan.



- Penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian pelaksanaan SPBE di Pemkab Grobogan.

Sedangkan langkah – langkah yang dilakukan berdasarkan urusan yang diampu adalah sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Pencapaian SPM Diseminasi Informasi dan cakupan masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah belum optimal.
- Pengembangan aplikasi perangkat daerah yang masih parsial.
- Menyediakan sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
- Memaksimalkan kualitas internet yang tersedia.
- Mengoptimalkan sistem layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.

2. Urusan Statistik

- Menyediakan metadata kegiatan statistik.

3. Urusan Persandian

- Menaikkan nilai Indeks KAMI yang masih rendah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa review diperlukan pada Rancangan Awal RKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menunjang sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Berikut ini akan disampaikan Review Rancangan Awal RKPD 2024 yang berdasarkan analisis kebutuhan dan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Review Rancangan Awal RKPD 2024

		Hasil Analisis Kebutuhan					
TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
98	2.202.000.000	I	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	Kab. Grobogan	98	2.202.000.000
100	5.623.650.000	II	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kab. Grobogan	100	5.623.650.000
100	170.000.000	III	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	% Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	Kab. Grobogan	100	170.000.000
100	295.000.000	IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	Kab. Grobogan	100	295.000.000
100	6.129.071.732	V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP	Kab. Grobogan	100	6.129.071.732
	14.419.721.732		JUMLAH				14.419.721.732



2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tidak secara langsung memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan pemangku kepentingan yang bersumber dari masyarakat secara langsung atau diluar organisasi perangkat daerah.
- Adapun pamengku kepentingan di sini hanya dari dalam organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sendiri.
- Berikut akan disajikan Tabel Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan

Program	Kegiatan & Sub Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<div>1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</div> <div>b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</div> <div>c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik</div> <div>d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</div> <div>e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</div> <div>f. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div>
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<div>1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</div> <div>b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</div> <div>2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>a. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</div> <div>b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</div> <div>c. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</div> <div>d. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</div> <div>e. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</div> <div>f. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</div> <div>g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</div>
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<div>1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</div> <div>b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</div> <div>c. Membangun Metadata Statistik Sektoral</div>
PROGRAM PENYELENGGARAAN	<div>1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div>



Program	Kegiatan & Sub Kegiatan
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<div>a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<div>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</div> <div>a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</div> <div>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</div> <div>a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</div> <div>4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</div> <div>a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</div> <div>b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</div> <div>5 Administrasi Umum Perangkat Daerah</div> <div>a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</div> <div>b Penyediaan Bahan Logistik Kantor</div> <div>c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div> <div>d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</div> <div>e Penyediaan Bahan/Material</div> <div>f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</div> <div>6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>a. Pengadaan Mebel</div> <div>b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div> <div>7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div>a Penyediaan Jasa Surat Menyurat</div> <div>b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</div> <div>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div> <div>8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</div> <div>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div> <div>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</div>



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup : Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam Pembangunan Infrastruktur pada Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Transformasi Digital yang meliputi :

- Penuntasan Infrastruktur TIK
- Pemanfaatan Infrastruktur TIK
- Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Sedangkan Arah dan Prioritas Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "**Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari**" yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah meliputi:

- a. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
- b. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
- c. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis;

Sedangkan Arah dan Prioritas Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah Peningkatan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing, didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dan adaptif



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kedudukan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direncanakan merupakan implementasi program/kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperlukan guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan program yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 untuk rencana kerja Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026; Menetapkan visi Kabupaten Grobogan “**Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya**” yang memuat lima misi Pemerintah Kabupaten Grobogan. Maka yang terkait langsung dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah pada poin ke-3 “**Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan 2021- 2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.



3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-government.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Grobogan, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan melaksanakan misi yang ke 4 Dengan prioritas pembangunan yaitu **“Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”** dengan



merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja beserta program dan kegiatan berdasarkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan mensinkronkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2024.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan beserta Indikator dan Target Kinerja yang sudah ditentukan dan tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran, Indikator Tujuan dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		SPBE	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	nilai	3	3	,1	,2	,3	,4	,5
			Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	nilai	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)
			Nilai IKM	Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	nilai	B (80,71)	B (82,4)	B (82,7 0)	B (82,9 9)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,8 8)
		1. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi,	SPBE	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	nilai	3	3	,1	,2	,3	,4	,5
		2. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik,	Indeks KAMI	Indeks KAMI pada instrumen penilaian BSSN	nilai	na	I	I+	II	II+	III	III+



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data.	Presentase Data Urusan Teranalisis	Data Urusan Wajib dan Pilihan yang teranalisis ----- ----- x 100% Data Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota	%	n/a	n/a	0	5	0	5	5
		Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	nilai	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)
			IKM	Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	nilai	B (80,71)	B (82,4)	B (82,7 0)	B (82,9 9)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,8 8)



Kemudian akan dijabarkan kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2024 dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai Arah Kebijakan RKPD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024		KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GROOGAN TAHUN 2024		Kegiatan & Sub Kegiatan
	Arah Kebijakan	Program	Arah Kebijakan	Program	
1	Penguatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah, didukung peningkatan reformasi birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Responsif, Prpfesional, dan Modern	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas f. Penyediaan/Pengad aan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



No	RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024		KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GROOGAN TAHUN 2024		Kegiatan & Sub Kegiatan
	Arah Kebijakan	Program	Arah Kebijakan	Program	
					<div>a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</div> <div>b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</div> <div>2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>a. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</div> <div>b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</div> <div>c. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</div> <div>d. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</div> <div>e. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</div> <div>f. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</div>



No	RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024		KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GROOGAN TAHUN 2024		Kegiatan & Sub Kegiatan
	Arah Kebijakan	Program	Arah Kebijakan	Program	
					g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi c. Membangun Metadata Statistik Sektoral
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi



No	RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024		KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GROOGAN TAHUN 2024		Kegiatan & Sub Kegiatan
	Arah Kebijakan	Program	Arah Kebijakan	Program	
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<div>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<div>a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</div></div> <div>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<div>a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</div></div> <div>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<div>a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</div><div>b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</div></div> <div>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah<div>a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</div><div>b Penyediaan Bahan Logistik Kantor</div><div>c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div><div>d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</div><div>e Penyediaan Bahan/Material</div><div>f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi</div></div>



No	RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024		KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GROOGAN TAHUN 2024		Kegiatan & Sub Kegiatan
	Arah Kebijakan	Program	Arah Kebijakan	Program	
					<div>dan Konsultasi SKPD</div> <div>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<div>a. Pengadaan Mebel</div><div>b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div></div> <div>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<div>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</div><div>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</div><div>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div></div> <div>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<div>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</div><div>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div><div>c. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</div></div>



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada pasal 1 ayat (30) disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut dimaksudkan untuk mencapai sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta lokasi pembangunan yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Demikian pula dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam dokumen Renja yang memuat urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta lokasi pembangunan yang sudah di masukkan kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI yang sudah digunakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Dinas Komunikasi dan Informatika							14.419.721.732,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.419.721.732,00		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							13.954.721.732,00		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.129.071.732,00		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							72.984.200,00		
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									



					% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	5 Laporan	100 %	72.984.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.925.083.532,00	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
					% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	% pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	32 Orang/bulan	100 %	3.925.083.532,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							284.394.000,00	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
					% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	% penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Paket	100 %	44.394.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								



						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	% penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	60 Orang	100 %	240.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								984.000.000,00	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Paket	100 %	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1100 Paket	100 %	342.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									



						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Paket	100 %	54.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	72 Dokumen	100 %	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material									
						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Paket	100 %	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	500 Laporan	100 %	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								155.000.000,00	
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel									



						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	51 Unit	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	25 Unit	100 %	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								206.000.000,00	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Laporan	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									



					% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	12 Laporan	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
					% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	12 Laporan	100 %	54.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							501.610.000,00	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
					% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	7 Unit	100 %	81.610.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								



					% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	290 Unit	100 %	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
					% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	4 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							2.202.000.000,00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							2.202.000.000,00	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik								
					% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	% Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	1 Dokumen	78 %	116.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik								



						% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	% Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	1 Dokumen	78 %	56.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
						% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	% Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	3 Dokumen	78 %	58.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik									
						% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	% Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	25 Orang	78 %	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas									



					% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	% Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	5 Dokumen	78 %	1.735.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
					% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	27 Unit	78 %	213.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							5.623.650.000,00	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							4.524.375.000,00	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota								



						% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	% Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	375 Domain	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
						% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	100 %	3.824.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
					% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	% Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Unit	100 %	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1.099.275.000,00	
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik								
					% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	2 Dokumen	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik								



						% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	213 Unit	100 %	169.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah									
						% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	273 Layanan	100 %	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas									
						% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	107.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									



						% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Dokumen	100 %	220.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)									
						% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	12 Dokumen	100 %	282.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE									
						% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Dokumen	100 %	64.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								170.000.000,00	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								170.000.000,00	



2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								170.000.000,00	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									
						Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	% OPD yang memiliki buku profil data statistik	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Dokumen	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi									
						Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	% OPD yang memiliki buku profil data statistik	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	325 Orang	100 %	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral									
						Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	% OPD yang memiliki buku profil data statistik	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	11 Dokumen	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								295.000.000,00	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								295.000.000,00	



2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							33.000.000,00		
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
						Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	% OPD dengan pengamanan informasi	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Dokumen	100 %	33.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							262.000.000,00		
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
						Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	% OPD dengan pengamanan informasi	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	49 Perangkat Daerah	100 %	262.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL													14.419.721.732,00	



BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan Keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, serta Peraturan Bupati Grobogan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 untuk Tahun Anggaran 2024.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

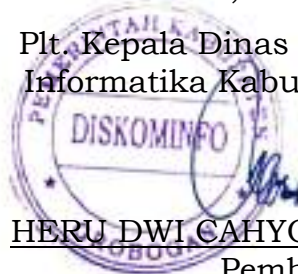
1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) dan



- melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum ranwal renja dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam ranwal renja ini dapat tercapai;
 3. Ranwal Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala;
 5. Keberhasilan pencapaian target yang tertuang dalam Ranwal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan diperlukan sinergitas dan dukungan dari stakeholder dan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Ranwal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwodadi, 6 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Grobogan



HERU DWI CAHYONO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19801105 200112 1 003